

KUASA ORMAS DI RANAH MINANG: PENOLAKAN ORMAS KEAGAMAAN TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT SILOAM DI KOTA PADANG

Oleh:

Zulfadli

Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

Beni Kharis Arrasuli

Dosen Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Andalas Padang

Abstrak: Pembangunan Rumah Sakit Siloam Menuai pro dan kontra di Kota Padang. Bagi kalangan yang mendukung, bahwa pembangunan Rumah Sakit Siloam akan menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perekonomian masyarakat sumbar. sementara bagi kalangan yang tidak setuju yaitu ormas Islam, mereka menolak keras pembangunan rumah sakit Siloam tersebut karena sarat dengan adanya agendang tersembunyi yaitu misi kristenisasi. Di satu sisi pemerintah dengan para stakeholdernya telah menyetujui pembangunan rumah sakit Siloam, namun rencana pembangunan tersebut kandas seiring dengan besarnya penolakan dari organisasi keagamaan dalam menolak pembangunan rumah sakit tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, ingin melihat secara komprehensif mengapa ormas Islam menolak pembangunan rumah sakit Siloam di Kota Padang.

Kata Kunci: Penolakan, Ormas keagamaan, Kristenisasi

DOI:content, formatting, article

PENDAHULUAN

Pembangunan Rumah sakit Siloam menuai pro dan kontra di Kota Padang. Di satu sisi dianggap sebagai kebijakan investasi yang cukup besar dalam mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang cukup besar di Sumatera Barat. Sementara di sisi lain dengan adanya rumah sakit Siloam dianggap memiliki agenda tersembunyi, yaitu ada upaya kristenisasi dibalik pembangunan rumah sakit tersebut. Studi ini bermaksud untuk mengungkap berbagai macam sikap politik ormas Islam dalam menolak pembangunan rumah sakit siloam di Kota Padang. Selain itu penelitian ini adalah melacak sikap politik ormas Islam dalam menolak pembangunan rumah sakit Siloam, serta mengidentifikasi sikap politik tersebut secara komprehensif yang dinilai sangat variatif-dinamis.

Semenjak adanya rencana pembangunan rumah sakit Siloam di kota Padang, proses implementasinya menghadirkan bermacam-macam respon dan tanggapan dari elit lokal dan ormas Islam sebagai representasi masyarakat kota Padang. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan variasi sikap politik ormas Islam, berikut kepentingannya dalam menolak pembangunan rumah sakit Siloam. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan variasi sikap politik ormas di kota Padang berikut

kepentingannya dalam menolak implementasi pembangunan rumah sakit siloam di Kota Padang.

Investasi *Lippo Group* di Kota Padang ini berawal ketika, Walikota Fauzi Bahar datang ke Jakarta pada tahun 2010 untuk mencari investor. Saat itu Fauzi Bahar menemui Ismail Ning (pengusaha Minang) yang menjabat sebagai Presiden Komisaris *Lippo Group*. Setelah presentasi dan serangkaian pembicaraan, akhirnya Ismail bersedia turut serta membangun infrastruktur Kota Padang, dengan mendirikan *superblock* rumah sakit Siloam, sekolah Pelita Harapan, mall dan hotel di Kota Padang. Maka untuk itu, pemerintah Kota Padang mengadakan kerja sama dengan PT. Siloam International Tbk (SILO) untuk membangun infrastruktur Kota Padang ([Harian Singgalang, hariansinggalang.co.id](http://HarianSinggalang.hariansinggalang.co.id)).

Pasca terjadinya gempa berkekuatan 7,6 SR pada tanggal 30 September 2009, kondisi infrastruktur di Kota Padang tidak dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur yang mengalami kerusakan adalah: 4 bangunan kantor pemerintahan ambruk, 5 bangunan kantor pemerintahan rusak berat, 2 buah pasar rusak berat, 2 buah sekolah ambruk, 1 buah mesjid rusak berat dan 500 unit rumah penduduk mengalami kerusakan. Pemerintahan Kota Padang melaksanakan kerja sama dengan PT.

Siloam International Tbk (SILO) yang merupakan bagian dari *Lippo Group*¹ dalam pembangunan *superblock* yang terdiri dari: rumah sakit Siloam, sekolah Pelita Harapan, mall dan hotel di Kota Padang. Jumlah investasi PT. Siloam International Tbk (SILO) mencapai 2 triliun rupiah, dengan luas bangunan 94 ribu meter persegi.²

Rencana pembangunan rumah sakit Siloam tidak berjalan dengan mulus. peletakan batu pertama pendirian Rumah Sakit Siloam pada tanggal 10 Mei 2013 yang dihadiri oleh: Ketua DPD RI: Irman Gusman, Menko Kesra: Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat: Djan Farid, Ketua Majelis Syuro PKS: Hilmi Aminuddin, CEO *Lippo Group*: James T Riady, Presiden Lippo Group: Theo L Sambuaga, Kepala BNPB: Syamsul Ma'arif, Gubernur Sumatera Barat: Irwan Prayitno. MUSPIDA Sumatera Barat, MUSPIDA Kota Padang. Acara tersebut juga dihadiri oleh Brigadir Jendral Polisi Noer Ali, Letnan Jendral TNI (purnawiraman) Azwar Anas, Kolonel Infanteri Amrin, Walikota Padang: Fauzi Bahar, Pemimpin Umum Harian Singgalang: H. Basril Djabar, Kepala Cabang Permata Bank Padang: Rukiati Tasib, Emma Yohanna, Afrizal, Buya Mas'ood Abidin, tokoh masyarakat: Ratna Hasyim Ning, Ismail Hasyim Ning, Fasli Jalal, Didik J. Rachbini langsung menuai penolakan dari masyarakat. Peletakan batu tersebut untuk menetapkan pembangunan rumah sakit siloam yang meliputi yaitu peletakan batu pertama proyek Super Blok Lippo Group yang meliputi : (1) Rumah sakit Internasional "Siloam" , (2) Hotel Aryaduta , (3) Sekolah Pelita Harapan, (4) Pusat perdagangan (mall).³

¹ *Lippo Group* merupakan perusahaan swasta yang memiliki lebih dari 15 anak perusahaan di wilayah Cina daratan, Hong Kong, Macau, Indonesia, Filipina, Singapura dan Korea Selatan dengan aset US \$ 11 miliar. *Lippo Group* didirikan oleh Dr Mochtar Riady pada tahun 1950,

² *Tempo*, *Lippo Group Investasi Rp 2 Triliun di Kota Padang*, Andri El Faruqi, 10 Mei 2013, (<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/10/090479431/Lippo-Group-Investasi-Rp-2-Triliun-di-Padang>)

³ *Beritaanda.com*, *Gabungan Ormas Islam Terus Menolak Pembangunan Kawasan Lippo Group*, tanggal 9 Juni 2013, (<http://www.beritanda.com/nusantara/sumatera/sumatera-barat/14049-gabungan-ormas-islam-terus-menolak-pembangunan-kawasan-lippo-group.html>), diakses tanggal 4 Februari 2014.

Alasan bagi yang mendukung pembangunan rumah sakit Siloam. *Pertama* pendirian rumah sakit siloam menyediakan 3.000 tenaga kerja di Kota Padang dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)⁴. *Kedua* DPRD Kota Padang juga mendukung pembangunan rumah sakit Siloam setelah melakukan rapat paripurna dan penetapan ranperda menjadi perda tentang tata kota di kota Padang dan implikasinya terhadap pembangunan rumah sakit Siloam. Persetujuan, atas investasi RS Siloam itu dilakukan secara voting oleh DPRD Padang dengan suara yang mendukung investasi RS Siloam 28 orang dan yang tidak mendukung atau menolak enam orang. Fraksi yang mendukung investasi Lippo Group tersebut adalah, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PBB, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura. Hanya Fraksi PKS menolak, dan seorang anggota Fraksi Partai Demokrat Gustin Pramona.⁵ *Ketiga* izin terkait pembangunan rumah sakit Siloam dan perencanaan tata kota Padang sudah sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada.

Sementara di sisi lain, penolakan datang dari Forum Masyarakat Minang Anti Pembangunan Superblok Lippo Group dan aktivis organisasi sosial agama lainnya. Forum itu dihadiri Ketua MUI Sumbar Syamsul Bahri Khatib, Sekretaris MUI Sumbar Edi Safri, Ketua Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, Ketua

⁴ Pemerintah kota Padang melalui Sekretaris Daerah (Sekda), H. Syafril Basyir, S.H. menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik siapapun yang berminat menanamkan modalnya di kota ini. Menurut Sekda, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Padang tidak memadai. Sebanyak 65 % dari 2.2 triliun APBD per tahun dihabiskan untuk belanja pegawai. Hanya 35 % yang bisa dimanfaatkan untuk belanja publik dan pembangunan. "Makanya walikota gigih mencari investor ke luar. Untuk mendekati Lippo Group saja kita butuh dua tahun. Akhirnya dia sekarang mau membeli tanah di kota Padang. Coba bayangkan, sekitar tiga ribu lapangan pekerjaan terbuka dari investasi ini. Selain itu, mereka juga sudah berkomitmen akan menyerap 96 % tenaga kerja dari putra daerah Minangkabau. <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1190>

⁵ <http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2014/02/06/28963/akan-berhasilkah-misi-james-rivadi-bangun-rs-siloam-di-padang/#sthash.IYQ2h934>.

Tarbiyah Islamiyah Sumbar Boy Lestari Dt Palindih, dan aktivis ormas Islam lainnya.⁶

Secara umum, alasan penolakan elit lokal alam pembangunan *superblock* Siloam di Kota Padang. *Pertama* tidak adanya koordinasi antara pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang terkait investasi *Lippo Group* di Kota Padang. Padahal DPRD adalah wakil dari masyarakat Kota Padang, DPRD Kota Padang seperti tidak dianggap oleh Pemko Padang.

Kedua, belum adanya studi kelayakan dan izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) *superblock* milik *Lippo Group* dari institusi yang berwenang. *Ketiga*, karena James T. Riadi (CEO/Chief Executive Officer) *Lippo Group* adalah penerus keluarga Muchtar Riadi yang merupakan pendeta internasional yang berguru kepada Pat Robertson, yang dikenal sebagai misionaris internasional dan sempat mencela umat Islam pada tahun 2006

Keempat terkait dengan nama Siloam yang diambil dari kitab Nasrani yang berarti air suci, ada juga yang mengartikan Siloam yang di utus oleh Tuhan masyarakat Nasrani. Hal ini merupakan simbol-simbol agama Nasrani. Jika diperhatikan logo *Lippo Group* ada ular yang melingkari tiang dan ada merpati yang siap menerkam. Maksud dari logo tersebut dalam kitab suci Nasrani, ular adalah kecerdikan dan merpati lambang ketulusan. *Superblock* Siloam dikhawatirkan dapat menggerus nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* di Ranah Minang.

⁶ Forum pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Sumatera Barat yang terdiri dari : LKAAM Sumbar, Bundo Kandung Sumbar, MUI Sumbar, PW Muhammadiyah Sumbar, PW Nahdhatul Ulama Sumbar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Perwana Sumbar, Panji Alam Minangkabau (PAM), Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar, LKAM Kota Padang, MUI Kota Padang, Bundo Kandung Kota Padang, Dewan Da'wah Sumbar, Perti Sumbar, LDII Sumbar, Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM) Sumbar, Libas, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Penegak Syari'at Islam (KPSI), Paga Nagari, Front Masyarakat Pembela Islam (FMPI), HTI dalam pertemuan di kantor LKAM Sumbar tanggal 18 Mei 2013 menegaskan bahwa Sumatera Barat adalah Provinsi yang mempunyai filosofi "*Adaik Syara' , Syara' Basandi Kitabullah, Syara' mangato adaik mamakai, Alam takambang jadi guru*" (ABS SBK-SMAM-ATJG), dengan alasan itu, forum masyarakat sumbar tolak pendirian rumah sakit Siloam, pembangunan rumah sakit Siloam

Kelima: alasan aqidah yaitu: pembangunan rumah sakit Siloam merupakan ajang Kristenisasi. Karena misi Kristenisasi berdampak pada tiga modus: pelayanan publik dan bantuan *rescue*, pendidikan dan penyebaran kependudukan melalui pengusaha yang bergerak di bidang properti. *Kelima*, alasan ekonomi dimana Kota Padang tidak membutuhkan investasi dalam bentuk *mall*, rumah sakit, hotel dan sekolah Kristen. Contohnya Berdasarkan data yang terhimpun, penduduk kota Padang yang hanya berjumlah sekitar 800 ribu jiwa dengan jumlah rumah sakit Pemerintah dan swasta sebanyak 25 buah dan memiliki tempat tidur sekitar 1.500 unit, tidak lagi sebanding. Saat ini beberapa rumah sakit di kota Padang ini tingkat keterhuniannya sangat rendah sekitar 50-60 persen. Diperparah lagi dengan beberapa rumah sakit swasta tingkat huniannya di bawah 50 persen. Untuk rumah sakit yang ada saja, sudah sangat kompetitif. Apalagi dengan datangnya rumah sakit Siloam. Yang merupakan rumah sakit besar di Indonesia, tentunya akan melumpuhkan rumah sakit Lokal secara perlahan-lahan. Demikian juga dengan jumlah fasilitas sekolah kristen di kota Padang, sudah lebih dari cukup. *Keenam*, alasan hukum karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak ada dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak dipedulikan karena kawasan Khatib Sulaiman (tempat pembangunan rumah sakit Siloam) diperuntukkan sebagai tempat perkantoran Dinas Provinsi Sumatera Barat. *Ketujuh*, alasan sosial budaya yang bertolak belakang dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai* dan akan membuat kondisi sosial di Kota Padang menjadi tidak stabil.

Akhirnya pada tanggal 29 Januari 2014 bertempat di Balai Kota, Fauzi Bahar (Walikota Padang) mengadakan jumpa pers dan mengumumkan bahwa pembangunan rumah sakit Siloam dan Sekolah Pelita Harapan dihentikan karena memperhatikan pertimbangan dari berbagai kalangan dan adanya beberapa perbedaan persepsi tentang keberadaan rumah sakit Siloam dan sekolah pelita harapan.⁷

⁷ Padangmedia.com, *Rumah Sakit dan Sekolah Batal Didirikan*, tanggal 29 Januari 2014, (<http://padangmedia.com/1-Berita/85991-Rumah-Sakit-Siloam-dan-Sekolah-Batal-Dibangun.html>). diakses pada tanggal 30 Maret 2014.

Rumusan Masalah

Pembangunan rumah sakit Siloam menuai penolakan yang sangat besar dari ormas Islam yang terdapat di Kota Padang. Sikap politik ormas Islam dalam menolak pembangunan rumah sakit Siloam sangat beragam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengapa ormas Islam menolak pembangunan rumah sakit siloam di Kota Padang

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dalam penelitian ini digunakan sejumlah acuan berupa tinjauan penelitian terdahulu dan teori. Hal ini dilakukan agar didapatkan gambaran, jawaban serta penjelasan secara teoritis terhadap penelitian yang dimaksud.

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian yang berkaitan dengan rumah sakit Siloam diantaranya adalah penelitian Fadhilatunnisa, mahasiswa ilmu politik 2011 dengan judul penelitian *Peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat dalam Gerakan Forum Mahasiswa Tolak Siloam (FMTS) tahun 2013*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa menjelaskan bagaimana peran KAMMI sumbar yang tergabung dalam forum mahasiswa tolak Siloam yang terjadi pada tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Karena peran mahasiswa KAMMI yang menjadi subjek penelitian maka penelitian ini menggunakan konsep teori gerakan sosial. Hasil penelitiannya adalah: KAMMI Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa pengurus KAMMI Sumatera Barat aktif dalam mempengaruhi mahasiswa di FMTS (Forum Mahasiswa Tolak Siloam) tahun 2013, yakni dengan memanfaatkan alat-alat interaksi dalam mekanisme gerakan *repertoire*: media cetak (koran dan *leaflets*) dan new media (*facebook* dan *twitter*), orasi-orasi di kampus, diskusi internal pengurus dan diskusi eksternal dengan organisasi mahasiswa ekstra dan intra-universitas, mengirimkan SMS kepada ketua organisasi mahasiswa intra dan ekstra universitas serta membentuk FMTS sebagai wadah untuk menyampaikan ide dan gagasan tentang upaya penolakan *superblock* Siloam di Padang, Kemudian peran KAMMI Sumatera Barat dalam mobilisasi mahasiswa FMTS melalui: *pertama*, kepemimpinan

yaitu dengan menjadi ketua presidium FMTS, perwakilan mahasiswa untuk koordinasi dengan FMMTS dan penanggungjawab koordinasi dengan DPRD Kota Padang.

Kedua, taktik: memiliki konsep dan tahapan aksi yang efektif di setiap aksi yang dilakukan. *Ketiga*, melalui suplai sumber daya material, seperti: waktu, KAMMI memanfaatkan waktu sebelum pembangunana *superblock* Siloam berlanjut dengan mempengaruhi mahasiswa untuk menolak *superblock* dan ikut dalam aksi penolakan, kemudian uang yang berasal dari kas pengurus KAMMI Sumatera Barat dan dana sukarela, serta keterampilan organisasi seperti: adanya drama teatikal dan penyiapan spanduk untuk ditandatangani oleh anggota dewan sebagai bentuk penolakan *superblock* Siloam.

Keempat, sumber daya penunjang lainnya, yaitu KAMMI Sumatera Barat dalam setiap aksi yang dilakukan selalu berjalan damai dan tertib. Maka, pengurus KAMMI Sumatera Barat aktif dalam memobilisasi mahasiswa di FMTS (Forum Mahasiswa Tolak Siloam) tahun 2013.

FMTS memiliki sumber daya yang memadai dalam aksinya berupa: dana yang bersumber dari uang kas KAMMI Sumatera Barat dan dana sukarela ketika aksi yang efektif untuk mempengaruhi dan memobilisasi massa, FMTS juga menyuarakan aspirasinya seperti dengan menyampaikan orasi ketika aksi, melalui tulisan di media cetak dan *leaflets*. KAMMI Sumatera Barat menggunakan mekanisme gerakan sosial *repertoire* dengan baik dan tepat pada demonstrasi FMTS di Kota Padang tahun 2013.

Tinjauan Teori

Ormas Keagamaan

Paling tidak dua hal mendasari kelahiran Organisasi Kemasyarakatan Islam (selanjutnya ditulis Ormas), pertama terkait dengan peran kemasyarakatan; Kedua, semangat keswadayaan.⁸ Keduanya menyatu menjadi sebuah spirit yang melatarbelakangi mengapa Ormas – terutama yang berbasis keagamaan – seperti Muhammadiyah, NU, Persis, PUI dan yang lainnya hadir dan tetap bertahan sampai saat ini. Secara kelembagaan Ormas hadir dalah untuk memberikan baktinya

⁸Anwar, M. Syaifi, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995, hlm 70

kepada masyarakat secara nyata. Di tengah situasi sosial yang sarat konflik (klik, penjajahan) Ormas hadir berjuang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam kondisi sulit. Pelayanan yang bersifat spiritual, pendidikan umum, hingga sosial bahkan mungkin ekonomi. Secara kasat mata, para pendiri Ormas juga pada dasarnya bukanlah orang berlebih dari sisi ekonomi dan pada umumnya tidak berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga dapat membuat kebijakan secara politis.

Namun dengan status sebagai masyarakat biasa mereka membaktikan dirinya lewat organisasi yang dibuat untuk mengaktualisasikan rasa kepedulian terhadap sesamanya. Pelayanannya berorientasi keluar, bukan ke depan. Spirit pelayanan yang berorientasi keummatan tanpa pandang bulu inilah membuat Ormas semakin cepat diterima masyarakat hingga ke pelosok-pelosok desa. Keberadaannya tidak eksklusif, tidak mengurung diri dalam penjara teologis yang eksklusif. Sikapnya sangat toleran, menghargai perbedaan, sehingga tidak canggung bercampur dengan orang yang berbeda paham. Demi perjuangannya mengayomi masyarakat, para pendiri dan elit Ormas tidak segan-segan untuk berbenturan dengan kekuasaan. Merasa diri merupakan representasi dari ummat sekaligus memperjuangkan kepentingan ummat, berhadapan dengan pejabat dari kalangan manapun mereka tidak pernah takut.

Selain itu para pendiri Ormas memang pada dasarnya tidak berorientasi pada kekuasaan sehingga tidak takut untuk dibenci dan dianggap lawan sekalipun oleh penguasa. Sedangkan semangat keswadayaan dalam konteks berormas mengandung sekurang-kurangnya dua makna penting. Pertama, membebaskan Ormas dari segala bentuk ketergantungan terhadap pihak luar, termasuk pemerintah. Dengan pilihan seperti ini, Ormas akan terbebas dari politisasi elit-elit tertentu dengan dalih telah melakukan “infestasinya” terhadap Ormas tertentu.

Gerakan Sosial

Kata “gerakan” menunjukkan orang yang tengah bergerak menolak tatanan yang ada dan mencari tatanan yang baru. Kata *movement* dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata kerja Prancis lama, *moveir*, yang berarti bergerak, mengobarkan, atau mendorong. Sedangkan menurut kamus

Oxford, istilah “gerakan” menunjukkan serangkaian aksi dan usaha seseorang untuk mendapatkan sebuah tujuan khusus.⁹

Dengan bahasa yang sama, Turner dan Killian, seperti yang dikutip oleh Haedar Nashir, mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dalam perkembangan mutakhir, suatu gerakan sosial selain memiliki bentuk-bentuk gerakan yang tidak melembaga, juga merupakan gerakan yang terorganisasi, berkelanjutan, dan tantangan kesadaran diri yang menunjukkan bagian identitas dari para pelakunya.

Dengan bahasa yang sama, Turner dan Killian, mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dalam perkembangan mutakhir, suatu gerakan sosial selain memiliki bentuk-bentuk gerakan yang tidak melembaga, juga merupakan gerakan yang terorganisasi, berkelanjutan, dan tantangan kesadaran diri yang menunjukkan bagian identitas dari para pelakunya.¹⁰

Dalam pengertian lain, gerakan sosial merupakan tindakan atau agitasi terencana yang dilaksanakan oleh kelompok tertentu disertai program terencana untuk menciptakan suatu perubahan, namun adakalanya gerakan sosial juga bertujuan mempertahankan kemapanan sosial. Dengan demikian, konsepsi sentral sebuah gerakan sosial adalah berbagai perilaku kelompok yang diarahkan dalam suatu cara yang disetujui bersama untuk mewujudkan sebuah perubahan sosial.

Dengan demikian, gerakan sosial akan terbentuk jika ada aksi kolektif yang mampu menciptakan sebuah kepentingan dalam sejumlah orang yang cukup besar. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa sebuah perubahan

⁹A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, sixth edition (Ttp.: Oxford University Press: 2000), hal. 832-834.

¹⁰ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007), hlm. 48-49.

tanpa memengaruhi atau berusaha memengaruhi struktur sosial tidak akan menciptakan sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial menyebarkan sebuah karakteristik umum: kekecewaan terhadap sistem yang ada dan berusaha membangun sebuah sistem yang lebih memuaskan. Sistem tersebut merupakan manifestasi berbagai perjuangan alternatif yang dilakukan pelakunya. Sistem tersebut juga berusaha membuka kedok proses-proses sosial yang sudah terjadi.

Karakteristik dan tipe-tipe gerakan sosial, gerakan paling tidak memiliki 5 karakteristik,¹¹ yaitu: *pertama*, suatu gerakan melibatkan sebagian besar individu yang berusaha memprotes suatu keadaan. Agar dapat dikategorikan sebagai gerakan, usaha sejumlah individu tadi harus memiliki persyaratan dasar dari suatu organisasi. *Kedua*, suatu gerakan harus mempunyai skop yang relatif luas. Gerakan tersebut mungkin berawal dari skop yang kecil, tetapi akhirnya harus mampu memengaruhi sebagian warga masyarakat. *Ketiga*, gerakan tersebut dapat menggunakan berbagai macam taktik untuk mencapai tujuannya. Taktik-taktik tadi bervariasi dari yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan sampai dengan menggunakan kekerasan. *Keempat*, meskipun gerakan tersebut didukung oleh individu-individu tertentu, namun tujuan akhir gerakan adalah mengubah kondisi yang ada pada masyarakat. *Kelima*, gerakan tersebut merupakan suatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk mengadakan perubahan dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya mungkin tidak menyadari segala tindakannya tetapi mereka tetap mengetahui tujuan utama dari gerakan tersebut.

Selain itu gerakan sosial juga mempunyai ciri memanfaatkan peluang politik (*political opportunities*), memobilisasi struktur (*mobilizing structures*), dan melakukan penyusunan proses gerakan (*framing process*).¹²

a. Peluang Politik (*Political Opportunities*)

Political opportunities structure atau kesempatan politik menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan

oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan. Gerakan sosial akan muncul ke permukaan ketika sistem politik dan ekonomi yang tertutup mengalami keterbukaan. Indikator munculnya gerakan sosial ke permukaan adalah *pertama* gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. *Kedua* ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai, sementara keseimbangan politik baru belum terbentuk. *Ketiga* ketika para elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. *Keempat* ketika para pelaku perubahan digandeng oleh para elit yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan.

b. Memobilisasi Struktur (*Mobilizing Structures*)

Struktur mobilisasi didefinisikan sebagai kendaraan kolektif baik formal dan juga informal. Melalui kendaraan ini, masyarakat memobilisasi dan berbaur dalam aksi bersama. Sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk didalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial.

c. Framing Proses (*Framing Proses*)

Framing proses adalah membuat framing masalah-masalah sosial dan ketidakadilan untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka terdorong melakukan sebuah perubahan. Framing merupakan identifikasi beberapa topik penting dalam memformulasikan sebuah isu. Framing membuat orang mampu memformulasikan sekumpulan konsep untuk berpikir dengan menyediakan skema interpretasi terhadap masalah-masalah dunia. Framing merupakan langkah-langkah yang strategik aktor-aktor gerakan untuk memperkuat konsensus dengan menggunakan sumber daya, teknik, sarana komunikasi dan jaringan yang ada. Signifikansi framing ini sebagai seni mengkomunikasikan pesan untuk menggerakkan audience dan memompakan dukungan serta partisipasi. Ideologi, sebagai sistem kepercayaan, ide, nilai dan makna biasanya bekerja untuk mendukung aktivitas framing ini.

¹¹ Ritzer dkk., dalam Haryanto, *Gerakan Sosial Politik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 3.

¹² Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007), hlm 7-14

Aspek Mikro (Internal Diri Aktor)	Aspek Makro (Eksternal Diri Aktor)
Ideologi diri	Kondusivitas structural
Nilai-nilai diri	Ketegangan struktural
Perspektif memandang suatu fenomena	Penyelenggaraan pemerintah
Sumber daya diri	Strategi pembangunan
Komitmen diri	Situasi dan Kondisi yang sedang berlangsung

Sumber: (Wahyudi, 2005: 198)

Pendekatan Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang ingin menghasilkan data bersifat deskriptif, yaitu berupa hasil ucapan, tulisan, dan perilaku individu atau kelompok yang dapat diamati berdasarkan subyek itu sendiri. Dalam upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok maka wawancara terbuka dan observasi menjadi penting untuk dilakukan. Dengan begitu, pendekatan deskriptif ini lebih menekankan kepada latar belakang perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara keseluruhan. Data primer diperoleh dengan wawancara, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun melalui studi kepustakaan atau hasil penelitian yang relevan.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penolakan masyarakat sipil berbasis ormas keagamaan berawal ketika peletakan batu pertama yang dihadiri oleh sejumlah tokoh elit Sumbar dan Nasional. Diantara yang menghadiri peletakan batu pertama tersebut adalah Ketua DPD RI: Irman Gusman, Menko Kesra: Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat: Djan Farid, Ketua Majelis Syuro PKS: Hilmi Aminuddin, CEO Lippo Group: James T Riady, Presiden Lippo Group: Theo L Sambuaga, Kepala BNPB: Syamsul Ma'arif, Gubernur Sumatera Barat:

Irwan Prayitno. MUSPIDA Sumatera Barat, MUSPIDA Kota Padang. Acara tersebut juga dihadiri oleh Brigadir Jendral Polisi Noer Ali, Letnan Jendral TNI (purnawiraman) Azwar Anas, Kolonel Infanteri Amrin, Walikota Padang: Fauzi Bahar, Pemimpin Umum Harian Singgalang: H. Basril Djabar, Kepala Cabang Permata Bank Padang: Rukiat Tasib, Emma Yohanna, Afrizal, Buya Mas'oeed Abidin, tokoh masyarakat: Ratna Hasyim Ning, Ismail Hasyim Ning, Fasli Jalal, Didik J. Rachbini.

Sontak, setelah peletakan batu pertama tersebut, muncul beragam reaksi dari elit dan ormas Islam di Sumatera Barat. Dari tingkat elit, penolakan tersebut dimotori oleh surat yang disampaikan oleh Muchtar Nair kepada ketua DPD RI Irman Gusman yang juga menghadiri peletakan batu pertama Rumah Sakit Siloam, untuk menolak pembangunan rumah sakit Siloam di Kota Padang, dengan alasan potensi adanya isu kristenisasi. Surat yang dibuat oleh Muchtar Naim tersebut ibarat bola panas, semakin lama dia semakin besar dan berapi. Apalagi setelah surat tersebut, sudah berseliweran di media massa dan media sosial Beraneka macam tanggapan dan kontra juga menuai di tengah-tengah masyarakat Sumbar itu sendiri. Apalagi alasan yang mengemuka adalah masalah isu-isu agama. Selain reaksi dari tingkat elit tanggapan dalam pembangunan rumah sakit Siloam juga muncul dari sejumlah ormas Islam dan gerakan mahasiswa yang terdapat di Sumatera Barat. Penolakan ormas Islam, pada awalnya hanya

bergerak atau melakukan aksi sesuai dengan oramas masing-masing. Namun pergerakan ormas tersebut semakin lama semakin besar, sehingga mayoritas ormas Islam di Kota Padang juga turut menolak pembangunan rumah sakit Siloam tersebut. Sehingga terdapat sejumlah penolakan yang dilakukan. Pertama pada tanggal 10 Juni 2013 di kantor DPRD Kota Padang dengan jumlah massa 30 orang, aksi kedua tanggal 28 November 2013 di kantor DPRD Kota Padang dengan 2.425 massa dan terakhir tanggal 12 Desember 2013 jumlah massa 1.200 orang. Pada saat aksi tersebut, massa yang hadir tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja tetapi juga dari pelajar, masyarakat, alim ulama, perantau dan kaum adat

Diantara ormas tersebut, dalam penelitian ini akan di jelaskan ormas Islam MUI dan Hizbut Tahrir dalam menolak pembangunan rumah sakit Siloam.

Penolakan Ormas Islam: MUI dalam menolak pembangunan Rumah Sakit Siloam

Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI merupakan lembaga/ormas Islam yang memiliki tujuan sebagai mediasi antara kepentingan-kepentingan umat Islam atau aspirasi umat Islam dengan pemerintah. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah MUI merupakan lembaga penengah dalam memediasi kepentingan-kepentingan umat Islam. Dalam konteks penolakan ormas keagamaan yang terdapat di Sumatera Barat, MUI sebagai lembaga ormas Islam sangat pro aktif dalam menolak pembangunan rumah sakit Siloam tersebut. Kondisi ini tentu sangat ironis dengan basis massa MUI itu sendiri, yang relatif tidak ada. Semenjak munculnya penolakan ormas-ormas Islam dalam pembangunan rumah sakit Siloam, MUI mengambil kendali gerakan penolakan rumah Sakit Siloam di Kota Padang atau Sumatera Barat, sebagai Koordinator aksi penolakan rumah sakit Siloam. Seiring dengan banyaknya muncul penolakan ormas Islam dalam menolak pembangunan rumah sakit Siloam, dengan alasan demi kemaslahatan umat Islam, maka MUI turut aktif dalam

gerakan penolakan pembangunan rumah sakit Siloam tersebut. Sebagai koordinator dalam penolakan rumah sakit Siloam langsung di pimping oleh ketua MUI Sumbar yaitu, Buya Gusrizal Gazahar. Karena penolakan rumah sakit siloam ini, sudah meluas ke semua lapisan umat Islam, maka MUI perlu turun tangan dalam aksi penolakan rumah sakit Siloam.

Menurut Gusrizal Gazahar MUI sebagai lembaga ormas Islam penting untuk terlibat dalam gerakan penolakan umat Islam, bahkan MUI sendiri merupakan koordinator dari ormas-ormas Islam yang ada di Kota Padang. Penolakan ormas Islam dalam menolak pembangunan rumah sakit Siloam, merupakan isu mendasar dan utama bagi umat Islam di Sumatera Barat. Sehingga Isu tersebut sangat sensitif dan bagi umat Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gusrizal Gazahar

“ James T Riadi (CEO/*Chief Executive Officer*), mereka bukannya tidak mengetahui pembangunan rumah sakit Siloam akan menuai pro dan kontra di Kota Padang, justru yang lebih dalam pada itu, rencana pembangunan tersebut sama halnya dengan melawan matahari di Sumatera Barat”

Penjelasan yang disampaikan oleh Gusrizal Gazahar tersebut, MUI sebagai lembaga ormas Islam di Sumatera Barat, menilai bahwa pembangunan rumah sakit Siloam sarat dengan adanya agenda terselubung, yaitu kristenisasi. Lippo Group merupakan penerus keluarga Muchtar Riadi yang merupakan pendeta internasional yang berguru kepada Pat Robertson, yang dikenal sebagai misionaris internasional. Selain itu, terkait dengan nama Siloam yang diambil dari kitab suci Nasrani yang berarti air suci, ada juga yang mengartikan Siloam: yang diutus oleh Tuhan masyarakat Nasrani. Jika diperhatikan logo Lippo Group, ada gambar ular melingkari tiang dan ada merpati yang siap menerkam, maksudnya dalam kitab Nasrani, Ular adalah kecerdikan dan merpati lambang ketulusan. Nama dan logo ini berarti

adanya visi dan misi dalam menyebarluaskan agama Nasrani. Pembangunan rumah sakit Siloam dikhawatirkan dapat merusak nilai-nilai *Adaiik basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* di Ranah Minang. Selain semenjak isu, Siloam muncul dan berkembang di Sumatera Barat, bahwa MUI pernah melakukan studi terhadap rumah Sakit Siloam lainnya yang terdapat di Jakarta, Banten dan Batam. dari kesimpulannya menilai bahwa RS Siloam, memiliki agenda halus/ terselubung karena kebanyakan karyawan yang bekerja di RS Siloam, banyak yang tidak menggunakan Jilbab dan minim sarana ibadah atau mushalla di RS tersebut.

Dengan munculnya isu, kristenisasi, hal ini semakin diperkuat oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Toni Markos bahwa isu-isu kristenisasi sangat sensitif dan masyarakat Minang sendiri mengalami pengalaman traumatik dalam menanggapi isu kristenisasi tersebut.

Ungkapan Toni Markos “penolakan RS Siloam dengan alasan kristenisasi dapat dibenarkan, karena dalam masyarakat Minang sendiri pernah mengalami pengalaman traumatik dan raktif dalam menanggapi isu kristenisasi tersebut”

Di Sumatera Barat, pada masa dahulu ada kasus Wawah, ada isu kristenisasi di RS Jantung dan Stroke di Bukittinggi, ada upaya menjadi Kepulauan Mentawai bagian dari misionaris dan ada RS Yos Sudarso yang pada masa lalu pernah menuai demonstrasi di Kota Padang. Kondisi ini tentu mengindikasikan bahwa masyarakat Sumbar traumatik dan sensitif terhadap isu-isu kristenisasi. Karena agama sangat *inbern* bagi masyarakat sumbar. Sebaliknya kalau tujuan pendirian RS Siloam adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap lapangan pekerjaan, kenapa tidak menggunakan investor lainnya. Seperti Basrizal Kota CEO BASKO yang juga bersedia untuk membangun RS di Kota Padang. Karena Basrizal Kota CEO

Basko sudah bersedia untuk membangun RS di Kota Padang.

Penjelasan yang disampaikan oleh koordinator Buya Gusrizal Gazahar yang juga ketua MUI dan Sekrketaris MUI Sumbar diatas, bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh ketua MUI Kota Padang, yaitu, Prof.Dr. Duski Samad.

Duski Samad menyampaikan “ MUI merupakan lembaga mediasi umat Islam dengan pemerintah bukan lembaga gerakan politik. Sejauh ini belum ada surat keputusan dari MUI dalam menolak pembangunan RS Siloam tersebut”.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah fungsi MUI adalah mediasi, tranformasi dan konsultasi antara umat Islam dengan pemerintah/negara, bukan gerakan politik. Karena MUI tidak memiliki basis massa idioligis di tengah masyarakat. Dalam tubuh internal MUI sendiri, terdapat sejumlah aneka macam perwakilan ormas Islam. MUI sesungguhnya adalah lembaga netral dalam menyikapi isu-isu terkait kepentingan umat Islam dan pemerintah. Dan mestinya pandangan MUI dalam memediasi antara umat Islam dan pemerintah bersifat moderat, bukan menjadi gerakan politik. Dalam konteks kasus Siloam yang terjadi di Kota Padang, bahwa MUI sebagai koordinator dari ormas-ormas Islam yang ada, merupakan personal yang menjadikan gerakan penolakan RS Siloam seolah-olah mengatasnamakan organisasi MUI.

Penolakan ormas Islam Hizbut Tahrir dalam menolak pembangunan RS Siloam di Kota Padang

HTI merupakan salah satu organisasi HTI adalah yang paling solid dan memiliki jaringan paling luas (internasional) di antara gerakan-gerakan baru yang getol berjuang menegakkan syariat Islam tersebut. Bahkan HTI juga yang paling radikal karena HTI tidak hanya bercita-cita menegakkan syariat Islam tapi juga mendirikan khilafah Islam.

Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif. HTI diantara ormas Islam yang sangat konsisten dalam menolak sistem demokrasi, anti kapitalisme dan investasi asing. Oleh karena itu, dalam konteks penolakan RS Siloam, HTI turut dalam gerakan menolak pembangunan RS Siloam, dengan diukung oleh basis massa dan simpatisan HTI yang berasal dari kalangan gerakan mahasiswa.

Menurut HTI Indonesia termasuk negara yang mengikuti sistem demokrasi dan mengikuti pola kapitalisme. Menurut Hizbut Tahrir, pola yang diikuti Indonesia, baik sistem demokrasi maupun kapitalisme tersebut dianggap sebagai ideologi Barat dan Amerika yang dinilai sebagai sistem kufr, sehingga sistem di Indonesia, menurutnya harus diganti dengan sistem Islam secara total dan radikal. Dengan ideologi kuat sebagaimana yang disebutkan diatas, apalagi dalam menolak pembangunan RS Siloam, sikap HTI secara tegas dan menolak, apalagi ada kaitannya investasi RS tersebut sarat dengan agenda terselubung kristenisasi.

Sehubungan dengan banyaknya ormas Islam yang menolak pembangunan RS Siloam Ust Abrian Alkaf sebagai ketua HTI Kota Padang mengatakan “sebagai ormas Islam, kami sudah sejak awal tegas menolak semua bentuk investasi asing yang ada di Indonesia”.

Segala bentuk investasi asing yang ada di Indonesia merupakan bentuk Amerikanisasi kepentingan asing dalam mengabil semua kekayaan alam Indonesia. Sehingga Indonesia tidak memiliki kemandiri dalam melakukan pengelolaan sumber daya alamnya. Demokrasi merupakan alat hegemoni yang digunakan oleh negara Barat dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Dalam penolakan RS Siloam, RS Siloam merupakan bentuk investasi asing, dalam memecah belah umat Islam di Sumatera

Barat. Apalagi yang yang berinvestasi merupakan kaum sekuler kapitalis dengan kedok investasi. Sudah pasti barang tentu, memiliki agenda dan tujuan sendiri di Sumatera Barat.

Penjelasan ini diperkuat oleh sekretaris HTI Kota Padang.

Adi Kurniawan “ Hizut Tahri dengan tegas menolak pembangunan RS Siloam, karena bententangan dengan sistem khilafah dan merupakan pembohongan yang dilakukan oleh kaum kapitas atas nama penyerapan tenaga kerja” . pembangunan RS Siloam tentu banyak mengedepan simbol-simbol agama nasrani dalam tata ruang bangunan yang mereka gunakan. Tentu saja pembangunan tersebut, sedikitnya banyaknya mempengaruhi.

Berdasarkan sikap politik penolakan ormas Islam diatas yaitu antara MUI dan HTI terdapat kesamaan alasan menolak pembangunan RS Siloam yaitu adanya agenda kristenisasi dan investasi dalam menyerap lapangan pekerjaan yang jauh panggang dari pada api. Setelah membandingkan keterangan dari dua oramas tersebut, yaitu MUI dan HTI dengan menambahkan infroman trianggulasi sebagaimana yang disampaikan oleh pemerhati sosio – keagamaan dari IAIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Tufik,

“Penolakan yang dilakukan oleh ormas Islam yaitu MUI dan HTI dengan alasan kristenisasi, merupakan alasan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat karena praktek kristenisasi merupakan praktek yang sulit untuk dibuktikan” sementara disisi, segala masalah adminstrasi dalam perencanaan pembangunan RS Siloam sudah dipenuhi oleh RS Siloam, Mulai dari Amdal dan tata ruang perkotaan, bahwa RS Siloam sudah mendapatkan izin untuk membangun RS Siloam.

Isu kristenisasi merupakan isu yang berlebihan sebagaimana yang dikedepankan oleh kedua ormas tersebut, kalau pun terdapat isu kristenisasi masalah tersebut susah untuk dibuktikan dan penyelesaiannya diselesaikan dengan

hukum yang berlaku. Persoalan perpindahan agama, bukan merupakan persoalan sederhana, apalagi bagi orang Minang. Sepahit-pahit apapun kehidupan orang Minang, yang namanya tetap dipertahankan. Apalagi RS tersebut juga dibangun di Kota Padang dimana semua masyarakat Sumbar bisa mengawasi apakah benar terjadi praktek kristenisasi tersebut atau tidak. Karena bisa jadi akan lain halnya kalau pembangunan RS tersebut dibangun di luar Sumbar, barangkali ada potensi atau kecenderungan isu-isu kristenisasi.

Selain itu diantara alasan penolakan RS Siloam melanggar perencanaan tata kota padang, karena wilayah Khatib Sulaiman merupakan kawasan perkantoran dan pemerintahan bukan kawasan bisnis. Namun dalam perkembangan hingga saat ini, ternyata kawasan Khatib Sulaiman sendiri, saat ini tengah dibangun sebuah pusat perbelanjaan terkemuka di Kota Padang yang juga sejajar dengan RS Siloam. Kekhawatiran adanya isu kristenisasi RS Siloam Kota Padang, dari pihak investor sendiri James T Riadi selaku CEO juga sudah bersedia mengganti nama RS Siloam menjadi *pertama* RS Minangkabau International Hospital, *kedua* Tidak ada diskriminasi bagi para karyawannya, dan membolehkan untuk menggunakan jilbab. *Ketiga* disetiap lantai akan dibangun Mushalla sebagai tempat sholat untuk orang Islam.

KESIMPULAN

Penolakan masyarakat sipil berbasis ormas keagamaan dalam menolak pembangunan masyarakat sipil berbasis ormas keagamaan di Kota Padang studi terhadap Ormas MUI dan HTI menyimpulkan beberapa kesimpulan

Pertama penolakan pembangunan RS Siloam yang dilakukan oleh ormas keagamaan dengan alasan kristenisasi sukar untuk dibuktikan. MUI dan HTI sebagai ormas Islam mengedepankan isu-isu kristenisasi dalam menolak pembangunan RS Siloam terkesan lebih banyak mengedepan politisasi agama dalam

merespon pembangunan RS Siloam di Kota Padang

Kedua penolakan ormas Islam dalam pembangunan RS Siloam di Kota Padang dengan alasan tidak memenuhi administrasi AMDAL dan tata ruang perkotaan sebagaimana yang terdapat di JL Khatib Sulaiman sebagai kawasan perkantoran, bukan kawasan bisnis, ternyata semua administrasi sudah dilengkapi oleh RS Siloam. Hal ini terbukti dengan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh sejumlah tokoh pemerintahan daerah dan provinsi dan nasional. Selain itu, saat ini tengah dibangun juga pusat perbelanjaan juga yang terdapat di JL Khatib Sulaiman, yang sejajar dengan pembangunan RS Siloam, namun tidak menuai penolakan oleh masyarakat.

Ketiga kalau memang isu kristenisasi yang dikedepankan, pihak RS Siloam juga sudah bersedia mengganti RS Siloam dengan RS International Hospital, dan juga tidak adanya diskriminasi terhadap karyawan yang menginginkan untuk menggunakan jilbab, dan selain itu, mereka juga bersedia untuk membangun mushalla disetiap lantai untuk keperluan umat Islam untuk melaksanakan ibadah

Keempat terdapat banyak kepentingan dalam menolak pembangunan RS Siloam di Kota Padang. Mulai dari pebisnis lokal dan juga Rumah sakit lainnya yang terdapat di Kota Padang sehingga pembangunan RS Siloam belum mendesak untuk dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arfani, Riza Noer, 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bottomore, T.B. 2006.

Bottomore, T.B. 2006, *Elit dan Masyarakat*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute.

Effendi, Sofyan (Ed). 1992, *Membangun Martabat Manusia:*

Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

mawan, Riswhanda, 1997. *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Puastaka Pelajar.

J.Meleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rodaskarya

K. Denzin, Norman & Yvona S. Lincoln (Eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Lauer, Robert H. 2003. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mas'ood, Mochtar, 1997. *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press.

Nurhasim, Moch (Ed). 2005, *Konflik Antar Elit Politik Lokal*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sanit, Arbi, 1993. *Sistim Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suzanna Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan elit-penentu dalam masyarakat modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 33.

Dwayne Marvick, "Elites" dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 286.

Maurice Duverger dalam *Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 180.

Media Massa, Koran, Majalah dan Internet

Hidayatullah.com, *KAMMI, PII dan KBMM Tolak Pembangunan RS Siloam*, 11 Juni 2013, (<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/06/11/2987/kammi-pii-dan-kbmm-tolak-pembangunan-rs-siloam.html>),

Tempo, *Lippo Group Investasi Rp 2 Triliun di Kota Padang*, Andri El Faruqi, 10 Mei 2013, (<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/10/090479431/Lippo-Group-Investasi-Rp-2-Triliun-di-Padang>),

Harian Singgalang, *hariansinggalang.co.id, Lippo Pintu Masuk Investor Besar*, tanggal 12 Desember 2013, (<http://hariansinggalang.co.id/lippo-pintu-masuk-investor-besar/>), diakses

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Inilah Data Akibat Gempa Tektonik di Sumatera*, Kamis 1 Oktober 2009 dimuat dalam Forum Muslim Menjawab.com (<http://forum.muslim-menjawab.com/2009/09/30/inilah-data-akibat-gempa-tektonik-di-sumatera/>).

Beritaanda.com, *Gabungan Ormas Islam Terus Menolak Pembangunan Kawasan Lippo Group*, tanggal 9 Juni 2013, (<http://www.beritaanda.com/nusantara/sumatera/sumatera-barat/14049-gabungan-ormas-islam-terus-menolak-pembangunan-kawasan-lippo-group.html>),

HTI Press, *hizbut-tahrir.or.id, Ribuan Warga Minangkabau Bersatu Tolak Superblok Lippo Siloam*, tanggal 25 November 2013, (<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/11/25/ribuan-warga-minangkabau-bersatu-tolak-superblok-lippo-siloam/>)

Minangkabaunews.com, *Forum Mahasiswa Tolak Siloam Sesalkan Ketidakhadiran Walikota Padang*, tanggal 12 Desember 2013, (<http://www.minangkabaunews.com/artikel-4347-forum-mahasiswa-tolak-siloam>

[sesalkan-ketidakhadiran-walikota-padang.html](#)),

Harian Haluan, *FMMTS Siapkan Demo Besar-besaran*, tanggal 17 Desember 2013, (<http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/28453-fmmts-siapkan-demo-besar-besaran->),

Antara sumbar.com, *KAMMI Sumbar Tolak Kenaikan Harga BBM*, tanggal 8 Maret 2012, (<http://www.antarasumbar.com/berita/padang/d/2/213673/kammi-sumbar-tolak-kenaikan-harga-bbm.html>),

Beritabatavia.com, *Warga Padang Tolak RS Siloam Milik Lippo Group*, tanggal 11 Juni 2013, (<http://www.beritabatavia.com/detail/2013/06/11/3/16795/warga.padang.tolak.rs.siloam.milik.lippo.group#.UufjTvsxXDd>